

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian.

Indonesia merupakan negara yang mayoritas masyarakatnya tinggal di pedesaan. Pemerintah menginginkan standar hidup ekonomi masyarakat mengalami peningkatan, karena itu dibentuklah lembaga ekonomi yang dapat membantu perekonomian masyarakat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Lembaga ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi pemerintah, tetapi dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa dan harus didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi.

Menurut Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang desa, salah satu pembangunan perekonomian berbasis hukum adalah Badan Usaha Milik Desa. Suatu desa dapat mendirikan badan usaha milik desa dengan adanya kebutuhan dan potensi desa. Selain itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang di dalamnya mengatur tentang BUMDes, yaitu pada Pasal 78–81, Bagian Kelima tentang Badan Usaha Milik Desa, serta yang terakhir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Prinsip efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan sosial diterapkan dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat dalam proses pendirian perekonomian pedesaan.

Strategi adalah sebuah rencana yang komprehensif mengintegrasikan segala *resources* dan *capabilities* yang mempunyai tujuan jangka panjang untuk memenangkan kompetisi. Gaffar (dalam Sagala 2007:137) bahwa strategi adalah rencana yang mengandung cara komprehensif dan integrative yang dapat dijadikan pegangan untuk bekerja, berjuang dan berbuat guna memenangkan kompetisi. Sedangkan menurut Miller (dalam Sagala 2007:139) strategi akan cukup mudah bagi kita akan menentukan kemana kita mencari. Wheelen dan Hunger (dalam Mulyasa 2003:217) strategi merupakan serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang.

Wiludjeng (2007:64) strategi merupakan program umum untuk mencapai sasaran organisasi dalam rangka melaksanakan misi. Strategi ini membentuk arah yang terpadu dari seluruh sasaran organisasi, dan menjadi petunjuk dalam penggunaan sumber-sumber daya organisasi yang akan digunakan dalam rangka mencapai sasaran. Penyusunan strategi dapat dilakukan menurut langkah-langkah tertentu : 1) tentukan tujuan, 2) menetapkan ukuran, 3) hilangkan perbedaan yang terjadi, 4) memilih alternative, 5) penerapan perencanaan strategis, dan 6) mengukur dan mengawasi kemajuan.

Strategi memegang peranan penting dalam suatu organisasi untuk mewujudkan tujuan dan tercapainya suatu visi dan misi organisasi hal tersebut sebagai mana dikemukakan oleh J. Salusu dan Tjahja

(1999:97) strategi merupakan suatu seni menggabungkan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan. Pendapat tersebut sejalan dengan Suradinata (1996:148) yang mengemukakan bahwa strategi adalah rencana yang sifatnya serba komprehensif, bagaimana sesuatu organisasi dapat mencapai misi dan objeknya serta mengusahakan sekecil mungkin hambatan. Hal ini diperkuat dengan gagasan Glueck dalam Suradinata (1996:22) yang mengemukakan strategi adalah kesatuan rencana yang komprehensif dan terpadu yang menghubungkan kekuatan strategis organisasi dengan lingkungan yang dihadapi untuk menjamin tercapainya tujuan.

Pengelolaan BUMDes adalah proses penataan kegiatan yang dilaksanakan melalui fungsi-fungsi manajemen tentu gunanya sebagai tolak ukur untuk menentukan keberhasilan sebagai bentuk dari pencapaian tujuan bersama yang telah disepakati. Hal ini didukung oleh pendapat Alam (2007:127), yang mengemukakan bahwa “pengelolaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian kegiatan anggota organisasi dan proses penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan”. Kemudian Suprianto dan Muhsin (2008:142), mengatakan bahwa “pengelolaan adalah keterampilan untuk meramu komponen dan unsur-unsur yang terlibat dalam suatu sistem untuk mencapai hasil/tujuan yang direncanakan”. Sedangkan menurut Kiyosaki dan Lechter (2005:104),

bahwa “pengelolaan adalah sebuah kata yang besar sekali yang mencakup pengelolaan uang, waktu, orang, sumber daya, dan terutama pengelolaan informasi”.

Tujuan BUMDes yaitu meningkatkan perekonomian Desa dan mengoptimalkan pengelolaan aset-aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraanDesa, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraanmasyarakat desa melalui perbaikan pelayanan umum, dan pemeratan ekonomiDesa. Sifat usaha BUMDes adalah berorientasi pada keuntungan. Sifat pengelolaan usahanya adalah akuntabilitas, transparansi, partisipasif dan berkeadilan. Dan fungsi BUMDes adalah: sebagai penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdirinya BUMDes diharapkan desa menjadi lebih mandiri dan masyarakatnya pun menjadi lebih sejahtera. Dalam melembagakan BUMDes ini sesungguhnya telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Bab VII bagian Kelima yang menyatakan Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pendirian BUMDes, maka berdasarkan pasal 78 PP 72 Tahun 2005 tentang Desa, dijelaskan

bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota perlu menetapkan Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ketentuan mana meskipun agak terlambat juga diakomodir dalam peraturan teknis yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010.

BUMDes sebagai salah satu badan usaha yang beroperasi di desa haruslah memiliki perbedaan dengan badan usaha pada umumnya, hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDesa mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga di desa setempat. Pengelolaan BUMDes semestinya tetap berorientasi pada aspirasi masyarakat desa Kambingan Timur yang kemudian di bicarakan bersama-sama dalam musyawarah bersama untuk menetapkan program-program prioritas sesuai dengan keinginan dari masyarakat setempat, dan dalam pengimplementasian program-program yang ada haruslah dilakukan secara profesional dan transparan. Namun kenyataannya, pada saat melakukan observasi peneliti menemukan berbagai masalah dalam pengelolaan BUMDes Sejuta Dinar, mulai dari minimnya keterlibatan masyarakat dan tidak profesionalnya para pengurus atau administrator yang ada. Keberhasilan BUMDes dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya terletak di pundak para pengurus BUMDes itu sendiri, walaupun bentuk BUMDes ini terkesan lebih sederhana dibandingkan dengan badan usaha lain, tetapi pelaksanaan program atau

implementasi program yang ada tidaklah sederhana, karena dalam implementasi program yang ada, para administrator atau pengurus BUMDes haruslah benar-benar mengerti dengan keadaan desa setempat dan harus siap berimprovisasi dengan setiap perubahan situasi yang ada, namun tidak mengabaikan tujuan (*goal*) yang telah ditetapkan sebelumnya, karena keberhasilan dari pengelolaan BUMDes tidak ditentukan oleh satu faktor atau variabel saja, melainkan ditentukan dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang ada, seperti sumber daya manusia, finansial, standart oprasional prosedur (SOP) dan lain-lain. Dan ini menjadi alasan atau ketertarikan peneliti untuk meneliti pengelolaan pada BUMDes Sejuta Dinar Desa Kambingan Timur.

Berbicara tentang keberadaan BUMDes di setiap desa di Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten Sumenep. Dimana keberadaan BUMDes di Kabupaten Sumenep belum seluruhnya terbentuk di setiap desa, dari 330 Desa se-Kabupaten Sumenep, terdapat 298 dari 330 desa yang sudah membentuk BUMDes. Namun, yang aktif sebanyak 121 BUMDes, sisanya 102 tidak aktif. Dari 121 BUMDes yang aktif itu, baru 75 desa yang sudah membentuk lapangan pekerjaan dan dapat menyumbang PADes. (www.sumenepkab.go.id di akses pada tanggal 15 februari 2022). Dari 121 BUMDes yang aktif di kabupaten sumenep ini berlomba-lomba maju dan kenapa BUMDes Sejuta Dinar ini tidak maju. Sehingga ini menjadi alasan atau ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian pada BUMDes Sejuta Dinar di Desa Kambingan Timur.

Keberadaan BUMDes di Kabupaten Sumenep dapat dilihat di Kecamatan Saronggi, Dimana seluruh desa di Kecamatan Saronggi telah memiliki BUMDes. Salah satunya yaitu Desa Kambangan Timur dimana BUMDes di Desa Kambangan Timur telah berdiri sejak tahun 2019. Dan pada tahun 2020 desa kambangan timur mengeluarkan dana untuk BUMDes tersebut sebesar 100.000.000.-, dana ini digunakan untuk pembangunan tempat BUMDes dan untuk membeli peralatan atau barang-barang yang akan dikelola BUMDes tersebut. BUMDes ini dikenal dengan BUMDes Sejuta Dinar. BUMDes ini memiliki beberapa jenis unit usaha, diantaranya : bisnis penyewaan (*renting*), usaha perantara (*brokering*), bisnis keuangan (*financial business*), usaha bersama (*holding*), dan usaha pertokoan di bidang pertanian. Namun usaha yang berhasil diaktualisasikan adalah sektor pertokoan di bidang pertanian dikarenakan beberapa kendala yang tidak memungkinkan unit usaha lain beroperasi dengan baik.

Penelitian ini dilakukan pada BUMDes “Sejuta Dinar” yang ada di desa Kambangan timur Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep. Desa Kambangan Timur memiliki warga desa yang sebagian besar bekerja di bidang pertanian. Realita yang terjadi pada BUMDes Sejuta dinar ini dalam mendorong kesejahteraan masyarakat melalui unit yang dibangunnya, masih jauh dari harapan. BUMDes Sejuta Dinar ini sudah berdiri dari tahun 2019. Pada tahun 2020 terjadi perubahan kepala desa di desa kambangan timur sehingga ada perubahan pengurus pada BUMDes Sejuta Dinar tersebut. Pada pertengahan tahun 2020 Bumdes Sejuta Dinar

sudah tidak beroperasi lagi sampai saat ini. Berdasarkan wawancara dengan salah satu perangkat desa (Bapak Dedi pada tanggal 16 februari tahun 2022), Hal ini disebabkan karena lemahnya pengelolaan modal keuangan/finansial yang selama ini dijalankan oleh BUMDes Sejuta Dinar, sehingga seringkali ketidakseimbangan antara pendapatan dengan pengeluaran, Dan terus menerus mengalami penurunan modal usaha. Dan pada saat perekrutan pengurus BUMDes yang tidak sesuai dengan kebutuhan BUMDes. Karena selama perekrutan kepengurusan BUMDes ditunjuk langsung oleh Kepala Desa tidak melalui seleksi yang kriterianya dibutuhkan baik dari kemampuannya maupun dari pengalamannya, Dan penguasaan manajerial dalam mengelola BUMDes kurang memadai atau belum paham penuh dalam tata pengelolaan BUMDes.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat masalah ini kedalam suatu penulisan dengan memilih judul “Strategi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)” Sejuta Dinar Di Desa Kambingan Timur Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep”.

1.2 Rumusan masalah.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang disusun dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah Strategi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sejuta Dinar Desa Kambingan Timur Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep?”

1.3 Tujuan penelitian.

Berdasarkan perumusan masalah berikut yang telah penulis uraikan diatas maka penulis dalam penelitian ini membuat tujuan penelitian yaitu Untuk mengetahui strategi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sejuta Dinar Desa Kambingan Timur Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep.

1.4 Manfaat penelitian.

Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan manfaat kepada pembaca sebagai berikut :

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dalam memperkaya wawasan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada program studi administrasi publik mengenai strategi pengelolaan BUMDes.

2) Manfaat praktis

a). Penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat pemikiran dalam bentuk dokumen yang kaitannya dengan penelitian bagi mahasiswa maupun pembaca untuk mendapatkan data-data yang lebih lengkap.

b). Hasil penelitian ini diharapkan agar ini menjadi referensi terhadap BUMDes sejuta dinar ini untuk meningkatkan fasilitasi agar pengelolaannya lebih bagus.

1.5 Sistematika penulisan.

BAB I Pendahuluan, Dalam pendahuluan ini menjelaskan terkait latar belakang penelitian, rumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka Dan Kerangka teori, Berisi tulisan kajian terdahulu yang relevan terkait teori yang digunakan dalam penelitian serta referensi yang digunakan penelitian.

BAB III Metodologi Penelitian Dalam bab ini menjelaskan terkait metode yang akan digunakan dalam penelitian fokus permasalahan yang akan dikaji, jenis data, sumber data, metode analisis data.

BAB IV yaitu Gambaran umum objek penelitian. Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian yang terdiri dari sejarah BUMDes, Kondisi geografis, Jumlah penduduk, Serta visi-misi BUMDes, dll.

BAB V Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini menjelaskan terkait hasil penelitian dan analisa pembahasan penelitian yang telah diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

BAB VI Penutup. Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh oleh hasil penelitian.